



Pedagang tetap wajib pasang tarif

▶ UPT Malioboro dikebut

Oleh Yuspita Anjar Palupi
HARIAN JOGJA

UMBULHARJO: Pedagang makanan di kawasan Malioboro tetap diwajibkan memasang daftar makanan. Jika tidak, sanksi tegas tidak segan-segan akan diberikan kepada mereka.

Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya (Parsenbud) Kota Jogja, Hadi Muchtar kepada wartawan, Senin (6/4) mengatakan aturan ini wajib dilaksanakan untuk mengantisipasi komplain yang kerap muncul dari pembeli karena harga makanan jauh di atas normal. "Ketentuannya, semua pedagang makan, baik siang dan malam harus ada tarifnya," kata

“
 Jangan sampai ada kejadian pengunjung Malioboro komplain karena harga makanan dan minuman yang dijual tidak sebanding
 ”

Hadi Muchtar
 Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya (Parsenbud) Kota Jogja

Hadi mengatakan penempelan daftar menu dan daftar harga tersebut bersifat wajib. Guna menghindari Malioboro dari image buruk. "Jangan sampai ada kejadian pengunjung Malioboro komplain karena

na menu dan harga makanan dan minuman yang dijual tidak sebanding," ujar dia.

Dijelaskan ketentuan pemberian sanksi ini diberikan oleh pihak Kecamatan Gedongtengen dan Danurejan dengan sistem pemberian sanksi yang dilakukan secara bertahap. "Jika sudah diingatkan sebanyak tiga kali masih saja tidak menempel daftar menu dan harga sesuai dengan ketentuan maka kecamatan bisa mencabut izin berdagang yang bersangkutan di wilayah Malioboro," jelas dia.

Camat Danurejan, Wirawan Haryo Yudho menuturkan pembinaan pedagang terkait pemasangan daftar menu dan makanan secara terus menerus dilakukan. Pihaknya mengacu pada SK Walikota tentang pemasangan tarif menu makanan dan minuman.

"Bagi mereka yang tidak memasang akan kami laporkan ke Pemkot ke Dinas Keterlibatan," jelas dia.

Saat ini di Kecamatan Danurejan tercatat, sebanyak 33 pedagang lesehan yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM), 43 pedagang bakso dan es campur yang tergabung dalam Paguyuban Handayani, dan sebanyak 19 pedagang angringan yang tergabung dalam paguyuban Fatma.

Terkait pembuatan UPT Malioboro, Hadi Muchtar menuturkan menargetkan akan selesai sebelum libur musim lebaran. "Kalau bisa bulan Juli mendatang sudah selesai," kata dia.

Unit yang nantinya merupakan gabungan dari berbagai instansi ini nanti akan menjadi semacam badan otorita yang secara khusus mengurus Malioboro. Selama ini, kewenangan penataan Malioboro memang masih terpisah-pisah di berbagai instansi. Dengan penggabungan dalam satu UPT diharapkan penataan akan lebih padu dan cepat.

Diharapkan Kepada
 1. Walikota
 2. Wakil Walikota
 3. Sekretaris
 4. Asisten
 dan
 Embusan Kepada

lak Lan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Kecamatan/Kemantren Gedongtengen			
3. Kecamatan/Kemantren Danurejan			

Yogyakarta, 22 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005